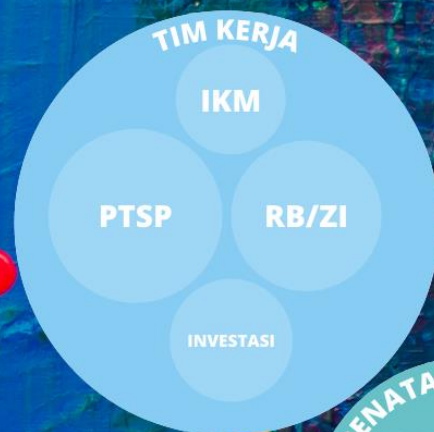


PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks. (0264) 8224794

Website : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

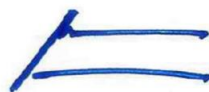
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang merupakan rencana kerja tahunan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Perubahan Rencana Kerja dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sampai dengan bulan Juni 2023 atau di TW II, Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan Tahun 2023.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

Purwakarta, Agustus 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.,
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	14
1.4. Sistematika Penulisan	15
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	17
2.1. Reviuw Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	17
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA	29
BAB IV. PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. RKPD tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun setelah disesuaikan dengan program, kegiatan dan anggaran pada perubahan APBD tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Daerah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan periodisasi Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hal ini mengakibatkan adanya perubahan Renja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Proses penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan Renja;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan Renja; dan
- c. penetapan

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian DanEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim

- Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 28. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 34. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
46. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

- 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun

- 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
56. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
57. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
58. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Kabupaten

Purwakarta;

59. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
60. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
61. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 95).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan perubahan program dan kegiatan dalam tahapan perubahan Tahun 2023 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini adalah untuk :

- 1) Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sampai dengan triwulan II Tahun 2023;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- 4) Meningkatkan pelayanan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; dan
- 5) Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

Reviu Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP
Kab. Purwakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

KABUPATEN PURWAKARTA

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023

**Reviu Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Sampai
Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2023 pada triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kab. Purwakarta. Capaian kinerja tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja DPMPTSP yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2016 tentang tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 yaitu **“Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif”**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu :

Pada Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun	91,82 Triliun	Tercapai 122,43%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	91.07	Tercapai 110.39%

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa dari 2 (dua) indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu :

1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dari target sebesar 75 Triliun, realisasi sebesar 91,82 Triliun, berarti tingkat pencapaian 122,43%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 82,50 realisasi 91.07 berarti tingkat pencapaian sebesar 110.39 %.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta pada tahun 2023 melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja, kegiatan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk mengetahui dan mengukur capaian kinerja, capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta pada Tahun 2023 s.d Triwulan II digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

Triwulan II Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan Program/Kegiatan	Indikator (sesuai RPJMD dan DPA)			APBD PARSIAL 1 Tahun 2023 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan II Tahun 2023		Selisih		Catatan Permasalahan
					Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 (6-9)	11	12
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					14.004.445.553			6.170.887.201	7.833.558.352	44,06	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.766.736.753			5.918.199.321	6.848.537.432	46,36	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	60.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	25.208.100	34.791.900	42,01	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Tersusunnya dokumen perencaTersusun nya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kab.Purwakarta	100%	20.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	10.185.900	9.814.100	50,93	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Tersusunnya dokumen perencaTersusun nya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	9.036.000	964.000	90,36	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Tersusunnya dokumen perencaTersusun nya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kab.Purwakarta	100%	30.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	5.986.200	24.013.800	19,95	

2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	7.612.759.615	Kab.Purwakarta	100,0%	3.727.826.705	3.884.932.910	48,97	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100%	7.592.759.615		100,0%	3.721.184.705	3.871.574.910	49,01	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	6.642.000	3.358.000	66,42	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	-	10.000.000	-	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	20.000.000	Kab.Purwakarta	100%	10.120.000	9.880.000	50,60	
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100%	20.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	10.120.000	9.880.000	50,60	

Perubahan Renja Tahun 2023

2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	138.500.000	Kab.Purwakarta	100,0%	9.450.000	129.050.000	6,82	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100%	58.500.000	Kab.Purwakarta	100,0%	-	58.500.000	-	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100%	80.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	9.450.000	70.550.000	11,81	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	764.042.530	Kab.Purwakarta	100%	292.517.594	471.524.936	38,29	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100%	50.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	26.909.500	23.090.500	53,82	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	60.352.930	Kab.Purwakarta	100,0%	13.359.000	46.993.930	22,13	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	287.733.600	Kab.Purwakarta	100,0%	114.751.522	172.982.078	39,88	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	124.962.000	Kab.Purwakarta	100,0%	38.042.800	86.919.200	30,44	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	6.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	2.800.000	3.200.000	46,67	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	60.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	-	60.000.000	-	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	150.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	71.860.772	78.139.228	47,91	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	24.994.000	Kab.Purwakarta	100,0%	24.794.000	200.000	99,20	

2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0%	450.000.000	Kab.Purwakarta	100%	199.243.000	250.757.000	44,28	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	100.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	-	100.000.000	-	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	350.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	199.243.000	150.757.000	56,93	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0%	2.824.664.608	Kab.Purwakarta	100%	1.223.002.889	1.601.661.719	43,30	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	17.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	3.600.000	13.400.000	21,18	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	620.265.000	Kab.Purwakarta	100,0%	187.897.630	432.367.370	30,29	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	2.187.399.608	Kab.Purwakarta	100,0%	1.031.505.259	1.155.894.349	47,16	

2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0%	896.770.000	Kab.Purwakarta	100%	430.831.033	465.938.967	48,04	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	108.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	31.332.033	76.667.967	29,01	
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	30.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	13.500.000	16.500.000	45,00	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	83.770.000	Kab.Purwakarta	100,0%	38.420.000	45.350.000	45,86	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	525.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	198.070.000	326.930.000	37,73	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab.Purwakarta	100,0%	150.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	149.509.000	491.000	99,67	

2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					210.000.000			7.556.000	202.444.000	3,60	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100,0%	110.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	3.000.000	107.000.000	2,73	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	Kab.Purwakarta	100,0%	110.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	3.000.000	107.000.000	2,73	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100,0%	100.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	4.556.000	95.444.000	4,56	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100,0%	100.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	4.556.000	95.444.000	4,56	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					174.000.000			53.761.600	120.238.400	30,90	
2.18.02.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100,0%	174.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	53.761.600	120.238.400	30,90	
2.18.02.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	Kab.Purwakarta	100,0%	80.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	51.832.000	28.168.000	64,79	
2.18.02.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	Kab.Purwakarta	100,0%	94.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	1.929.600	92.070.400	2,05	

24

2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					220.000.000	Kab.Purwakarta		54.670.800	165.329.200	24,85	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100,0%	220.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	54.670.800	165.329.200	24,85	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab.Purwakarta	100,0%	100.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	19.231.800	80.768.200	19,23	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab.Purwakarta	100,0%	80.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	25.752.300	54.247.700	32,19	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab.Purwakarta	100,0%	30.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	9.686.700	20.313.300	32,29	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab.Purwakarta	100,0%	10.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	-	10.000.000	-	

2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					406.890.600			107.461.280	299.429.320	26,41	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100,0%	406.890.600	Kab.Purwakarta	100,0%	107.461.280	299.429.320	26,41	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Purwakarta	Kab.Purwakarta	100,0%	112.890.600	Kab.Purwakarta	100,0%	90.900.000	21.990.600		
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Purwakarta	Kab.Purwakarta	100,0%	228.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	11.250.000	216.750.000	4,93	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Purwakarta	Kab.Purwakarta	100,0%	66.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	5.311.280	60.688.720	8,05	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					226.818.200			29.238.200	197.580.000	12,89	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100,0%	226.818.200	Kab.Purwakarta	100,0%	29.238.200	197.580.000	12,89	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi serta Data Perizinan dan Non Perizinan	Kab.Purwakarta	100%	226.818.200	Kab.Purwakarta	100,0%	29.238.200	197.580.000	12,89	

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023, DPMPTSP melaksanakan 6 program dengan 14 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. **14.020.445.553,-**. Kemudian pada Pagu Anggaran Parsial 1 berubah menjadi Rp. **14.004.445.553,-**. Adapun sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, realisasi terhadap pencapaian target keuangan DPMPTSP mencapai **44,06%** atau sebesar **Rp. 6.170.887.201,-**. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang belum terealisasi anggarannya namun sebagian kegiatan juga sudah mulai dilaksanakan secara fisik dan kinerjanya, namun masih dalam proses pengajuan pencairan di Pejabat Penatausahaan Keuangan internal DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ *feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa hasil evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di MPP Madukara dan Teras Madukara.
2. Memaksimalkan pemanfaatan OSS (*Online Single Submission*) sampai ke tingkat desa untuk mendekatkan pelayanan dalam pengurusan dokumen perizinan berbasis resiko.
3. Memaksimalkan kegiatan malam penganugerahan investasi melalui kegiatan *Anvesta Award*, kegiatan tersebut mendapat apresiasi baik dari pimpinan ataupun investor.

4. Terhadap Kecamatan yang mempunyai jarak terjauh dalam hal ini Kecamatan Maniis perlu direalisasikan peresmian pembukaan Teras Madukara.
5. Memaksimalkan kerjasama dengan unsur vertikal dalam pemberian produk layanan dan dalam rangka penerbitan produk layanan seperti : passport, isbat nikah, dll.
6. Sosialisasi standar pelayanan terpadu satu pintu di Kecamatan dan melalui media sosial.
7. Sosialisasi ke Perbankan terkait fungsi NIB sebagai legalitas usaha.
8. Memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai target peningkatan investasi serta ditunjang dengan pelaksanaan Forum Penyelesaian Masalah dan Bimbingan Teknis pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
9. Perlu upaya peningkatan pelayanan berbasis online.
10. Memaksimalkan pengelolaan pengaduan.

Sedangkan capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta pada Tahun 2023 s.d Triwulan II digambarkan pada tabel berikut ini :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun	91.82 Triliun	Tercapai 122.43%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	91.07	Tercapai 110.39%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PADA DPMPPTSP KABUPATEN PURWAKARTA

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target

yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 telah sesuai dengan program prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rincian program dimaksud sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah :

- 1) Penyusunan Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik) adalah merupakan kajian untuk kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk menganalisis fasilitas atau insentif apa saja yang dapat diberikan kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas / insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta daripada daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak / retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman modal dan sebagainya.
- 2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil investasi di Kabupaten

Purwakarta dalam bentuk dokumen/buku serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi Penanaman Modal adalah :

- 1) Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap metode dan cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan promosi penanaman modal, .
- 2) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan event investasi merupakan upaya dalam meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Teras Madukara di Kecamatan Maniis. Teras Madukara bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Kabupaten Purwakarta, antara lain layanan perizinan berusaha, layanan dokumen kependudukan dan sidang *online*.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah :

- 1) Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal Asing (PMA) and Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini mempunyai tujuan untuk

mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.

- 2) Pengelolaan Pengaduan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pengaduan dari masyarakat tentang perizinan beserta dampaknya.
- 3) Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas permohonan pembuatan perizinan dan non perizinan, kesesuaian antara jenis izin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
- 4) Pemutakhiran Database Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang, merupakan kegiatan pendataan atas izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta serta pemantauan terhadap aspek legalitas lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya di lapangan.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pelayanan Penanaman Modal antara lain :

- 1) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau, menganalisa, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan serta pelaksanaan proses pemenuhan komitmen perizinan berusaha maupun non perizinan berusaha.
- 2) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan “jemput bola” penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sampai tingkat desa, diutamakan bagi Usaha Mikro dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan.
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Selain itu disediakan pula sarana pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, baik secara *online* maupun *offline*, sebagai sarana evaluasi dan pengendalian terhadap kualitas layanan yang diberikan.
- 4) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat investasi di Kabupaten Purwakarta, dalam kegiatan ini diidentifikasi kriteria-kriteria pelaku usaha yang dapat diberikan kemudahan, fasilitas, maupun insentif penanaman modal yang akan difasilitasi berupa kemitraan dengan perusahaan besar.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal antara lain :

- 1) Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan, bertujuan untuk memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 2) Alih Media Arsip Perizinan, merupakan kegiatan konversi arsip perizinan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital (pdf), bertujuan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan ruangan arsip dan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu proses pencarian arsip apabila diperlukan.
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Perizinan *Online* yang dapat memudahkan dalam monitoring tata kelola perizinan sebagai komitmen dalam penerapan komponen standar pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Aplikasi GASPOL (Gawai Aplikasi Perizinan Online) yang terintegrasi dengan pelaporan pada *smartphone* pimpinan sehingga dapat memberikan data *real time* terkait penerapan standar pelayanan.

**Matriks Perubahan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2023**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											14.020.445.553	13.443.745.553	
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											12.766.736.753	12.256.036.753	
2	18	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											60.000.000	60.000.000	
2	18	01	2,01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,01	06	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,01	07	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	18	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7.612.759.615	7.412.759.615		
2	18	01	2,02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	100 %	100 %	7.592.759.615	7.392.759.615	Dana Perimbangan Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
2	18	01	2,02	05	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,02	07	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										20.000.000	20.000.000		
2	18	01	2,03	05	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini BB Opini	BB Opini BB Opini	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	18	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										138.500.000	138.500.000		
2	18	01	2,05	02	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	90 stel	90 stel	100 %	100 %	58.500.000	58.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,05	09	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	90 Orang	90 Orang	100 %	100 %	80.000.000	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										764.042.530	701.842.530		
2	18	01	2,06	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	21 Jenis	21 Jenis	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,06	03	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	0 Paket 32 Jenis	0 Paket 32 Jenis	100 %	100 %	60.352.930	60.352.930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	18	01	2,06	04	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	287.733.600	252.733.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,06	05	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	18 Jenis	18 Jenis	100 %	100 %	124.962.000	124.962.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,06	06	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,06	08	01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	60.000.000	32.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,06	09	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	12 Laporan / 1 tahun	12 Laporan / 1 tahun	100 %	100 %	150.000.000	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	18	01	2,06	10	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100 %	100 %	24.994.000	24.994.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											450.000.000	201.500.000	
2	18	01	2,07	05	01	Pengadaan Mebel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	1 Paket	0 Paket	100 %	100 %	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,07	06	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	1 Paket	1 Paket 0 Unit	100 %	100 %	350.000.000	201.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2.824.664.608	2.824.664.608	
2	18	01	2,08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	17.000.000	17.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,08	02	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	620.265.000	620.265.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	18	01	2,08	04	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang yang Menerima Honorarium dan Tunjangan Non ASN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	0 Laporan 1 Laporan 43 Orang/bulan	0 Laporan 1 Laporan 43 Orang/bulan	100 %	100 %	2.187.399.608	2.187.399.608	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											896.770.000	896.770.000	
2	18	01	2,09	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	108.000.000	108.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,09	05	01	Pemeliharaan Mebel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	60 Unit	60 Unit	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2,09	06	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	12 Jenis	12 Jenis	100 %	100 %	83.770.000	83.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	18	01	2,09	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	525.000.000	525.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2,09	10	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	BB Opini 100 %	BB Opini 100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	150.000.000	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												210.000.000	210.000.000	
2	18	02	2,01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												110.000.000	110.000.000	
2	18	02	2,01	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik) Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	390 Investor	390 Investor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	110.000.000	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	02	2,02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota												100.000.000	100.000.000	
2	18	02	2,02	02	01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Meningkatnya Kualitas Penyajian Data Potensi Investasi	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	390 Investor	390 Investor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Perubahan Renja Tahun 2023

2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										190.000.000	124.000.000		
2	18	03	2,01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										190.000.000	124.000.000		
2	18	03	2,01	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	8 Event	8 Event	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	80.000.000	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	03	2,01	02	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	8 Event	8 Event	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	110.000.000	44.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										220.000.000	220.000.000		
2	18	04	2,01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										220.000.000	220.000.000		
2	18	04	2,01	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	82 Poin 100 %	82 Poin 100 %	864 Pelaku Usaha 90 Poin	864 Pelaku Usaha 90 Poin	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	04	2,01	02	01	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	82 Poin 100 %	82 Poin 100 %	100 Kegiatan n Usaha	100 Kegiatan n Usaha	100 %	100 %	80.000.000	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	18	04	2,01	03	01	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	82 Poin 100 %	82 Poin 100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	04	2,01	04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	82 Poin 100 %	82 Poin 100 %	5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											406.890.600	406.890.600	
2	18	05	2,01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											406.890.600	406.890.600	
2	18	05	2,01	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	100 %	100 %	80 Kegiatan Usaha	80 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	112.890.600	112.890.600	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	18	05	2,01	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	100 %	100 %	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	100 %	100 %	228.000.000	228.000.000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	18	05	2,01	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	100 %	100 %	80 Kegiatan Usaha	80 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	66.000.000	66.000.000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik



Perubahan Renja Tahun 2023

2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										226.818.200	226.818.200		
2	18	06	2,01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										226.818.200	226.818.200		
2	18	06	2,01	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi serta Data Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	100 %	100 %	2 Aplikasi 500 Dokum en 2 Dokumen	2 Aplikasi 500 Dokum en 2 Dokumen	100 %	100 %	226.818.200	226.818.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TOTAL																	14.020.445.553	13.443.745.553	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan tindak lanjut atas Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta pelaksanaan terhadap hasil evaluasi atas Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2023, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian tujuan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta khususnya dan adanya keselarasan serta kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta perubahan Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada pengurangan pagu indikatif sebesar Rp. 576.700.000,- atau 4,11 % dari anggaran semula murni Rp. 14.020.445.553,- menjadi anggaran perubahan Rp. 13.443.745.553,- perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan DPA (DPPA) Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Purwakarta, Agustus 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.,
NIP. 19790605 200501 1 013